



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Wahiduddin Adams
2. Jabatan : HAKIM KONSTITUSI
3. NHK : 108089

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.090.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/100 m2 di KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 740.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/150 m2 di KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/57 m2 di KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 8925 m2 di OGAN KOMERING ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
5. Tanah Seluas 5704 m2 di OGAN KOMERING ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 45.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
7. Tanah Seluas 352.5 m2 di OGAN KOMERING ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 330.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 73.109.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 2.000.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 6.399.652.159

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 11.893.261.159



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.893.261.159

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.